

## MEA DATANG, JATIM SIAP MENYAMBUUTNYA !



Oleh : Zaenal Mutakin

Tahun 2016 baru kita tapaki. Tahun yang kita harapkan memunculkan pertumbuhan di bidang perekonomian di Indonesia dan Jawa Timur khususnya. Dan tahun ini pula, kita telah memasuki era ekonomi baru di kawasan Asean yang disebut *Asean Free Trade Area (AFTA)* yang bermuara pada terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community* sebagai salah satu fenomena globalisasi yang mau atau tidak mau harus kita hadapi bersama. Secara operasional, MEA merupakan sebuah pertarungan terbuka dan persaingan dengan semua negara anggota ASEAN. Khusus di sektor perekonomian, pertarungan terbuka itu meliputi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga terampil, dan arus modal yang lebih bebas. Dalam konteks MEA, secara tepat Pakde Karwo menyebutnya: “*Economic is a war!*”

Sebagaimana layak perang, paradigmanya *zero sum game*, saling mengalahkan. Untuk menghadapi perang ini, paradigma *business as usual* atau *economic as usual* tentu tidak berlaku. Tanpa strategi khusus, dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta (16% di antaranya di Jatim) atau sekitar 40% dari total seluruh penduduk negara anggota ASEAN. Konsumsi masyarakat yang besar dan jumlah penduduk kelas menengah yang terus naik, merupakan pasar potensial bagi negara-negara pesaing. Genderang perang sudah ditabuh gubernur Pakde Karwo. Karena Jatim tidak ingin hanya jadi pasar MEA tapi harus menjadi pelaku dan pemenang pasar.

MEA yang mulai berlaku tahun ini tampaknya menjadi berkah bagi Provinsi Jatim. Menurut informasi yang disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo (Bhirawa, 13/1), semua transaksi ke luar negeri baik barang maupun jasa khususnya ASEAN mengalami lonjakan. Dalam menghadapi MEA, Pemprov Jatim melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standardisasi produk barang dan jasa di Jatim. Kebijakan standardisasi produk barang dan jasa ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen menjadi perhatian penting pemerintah untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim. Tujuannya adalah mendorong kelancaran proses ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen ini salah satu bentuk pemerintah hadir dalam menjawab tantangan pemberlakuan MEA melalui kebijakannya. Pemerintah menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakatnya. Pemerintah juga hadir menjadi salah satu pemangku kepentingan untuk menghadapi ketatnya persaingan dengan negara lain. Ini merupakan sinergitas *triple helick*, yakni; pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk akademisi agar bangsa ini memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk standardisasi produk barang dan jasa yang dihasilkan UMKM di Jatim misalnya, Pemprov Jatim terus mendorong UMKM agar produk yang dihasilkan ber-SNI dan memiliki desain produk sesuai dengan standar pasar ASEAN. Pembinaan standardisasi dan desain produk industri pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI), diseminasi *Good Manufacturing Practice (GMP)*, diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, penerapan standar, peningkatan mutu produk, diseminasi Batik Mark, pelatihan desain produk, pelatihan manajemen, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk, bimbingan Gugus Kendali Mutu (GKM), serta bimbingan penerapan ISO pada IKM. Berbagai strategi dalam menghadapi MEA selain melakukan standardisasi barang dan jasa, strategi dilakukan melalui dukungan infrastruktur ekonomi, tersedianya kawasan industri, dukungan *soft* infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (*human development*), *government guarantee*, pembiayaan kompetitif melalui kredit linkage program untuk industri primer, dan pemasaran yang efektif melalui optimalisasi pasar domestik. Dukungan infrastruktur ekonomi dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur baik jalur darat (jalan arteri/tol, rel kereta api), jalur udara (bandar udara internasional dan domestik), jalur laut (pelabuhan baik internasional, domestik, dan alur pelayaran barat Surabaya).

Semangat Gubernur Jatim Soekarwo dalam menyambut MEA perlu kita dukung dari berbagai lini. Selain perlindungan dan standarisasi, kita pun bisa tengok komitmennya yang tertuang dalam rencana kerjanya pada tahun 2016 kaitannya dengan kehadiran MEA. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 ada penekanan yang kuat untuk memperkuat persiapan Jatim dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016. Salah satu pernyataannya yang wajib kita sokong adalah "Jatim siap dan optimis dapat bertarung pada pasar bebas Asean. MEA membuka koridor baru yang harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jatim. Selain menjadi basis perdagangan, industri, investasi dan tenaga kerja ahli, Jatim juga terus membangun regulasi yang bisa memihak kepada kepentingan masyarakat."

Ada istilah asing : "*You are what you think.*" Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Oleh karenanya terus lah kita berpikiran positif dalam menghadapi situasi apa pun. Karena kalau kita punya pikiran dan keyakinan (optimistis), insya Allah, Tuhan akan mengabulkannya. Begitu pun kalau sebaliknya. Oleh karenanya kita tidak boleh gentar atau kendur dan pantang menyerah. Karena mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, peristiwa itu sudah di depan kita. Di pelupuk mata kita. Genderang peperangan pasar bebas ekonomi Asean sudah ditabuh. Yuk mari kita hadapi MEA yang dimulai tahun 2016 ini dengan suka cita dan rasa optimistis dengan dasar, persiapan, atau modal yang kuat.

Konsep MEA merupakan satu sistem ekonomi yang terintegrasi di dalam kawasan Asean. Tujuannya agar lebih maju, efisien, dan beberapa kebijakannya seperti penerapan pasar tunggal dan berbasis produksi regional, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi merata, dan terintegrasi dengan perekonomian dunia. Dalam MEA, siapa pun dari mana pun bisa hilir mudik ke Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia ke negara-negara Asean, untuk berjualan/membeli. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Bagaimana tidak, AFTA/MEA memungkinkan mobilitas manusia makin tinggi. Keterbukaan pintu negara bagi para pendatang dari Asia dan Asean, mau tidak mau akan bersentuhan langsung dengan para pelaku usaha sejak dari bandara, di perjalanan, penginapan, pasar, tempat wisata, dan lain-lainnya. Ada begitu banyak masyarakat Indonesia yang harus berinteraksi, berkomunikasi dengan warga negara asing, mulai dari kalangan birokrat, politisi, aparat penegak hukum, sopir taksi, kondektur, tukang ojek, tukang becak, sampai dengan ibu-ibu yang menjajakan dagangan mereka di pasar.

Saya berpendapat, Indonesia dan Jawa Timur khususnya siap menghadapi MEA. Diterapkannya MEA membuka peluang bagi Indonesia (dan Jatim) untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan stabil (pertumbuhan ekonomi Jatim bahkan di atas rata-rata nasional), serta didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk berinvestasi. Apalagi dalam beberapa aspek terdapat perbaikan iklim investasi, seperti biaya perizinan yang makin murah, jumlah prosedur yang terus berkurang, dan waktu pengurusan yang makin cepat.

Menurut hemat saya, Provinsi Jawa Timur paling siap menghadapi MEA. Alasannya, posisi perdagangan luar negeri provinsi kita dengan negara-negara di ASEAN tercatat surplus. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat neraca perdagangan dominan provinsi ini ke lima negara ASEAN. Perdagangan Jawa Timur ke Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Malaysia sampai saat ini masih *leading*. Contohnya, nilai ekspor non-migas Jawa Timur ke Malaysia pada Oktober 2015 sebesar US\$ 93,5 juta atau meningkat 9,65 persen di banding pada September yang hanya US\$ 85,2 juta. Untuk ekspor dari Januari-Oktober 2015, total senilai US\$ 891,2 juta atau naik 5,88 persen di banding Januari-Oktober 2014 sebesar US\$ 814,6 juta. Mayoritas barang-barang yang diekspor adalah komoditas industri, seperti elektronik, kertas, makanan, dan minuman.

Meski masih kalah bersaing dengan Thailand dan Singapura, Jawa Timur saya perkirakan mampu bersaing pada era MEA ini. Asalkan pola perdagangan mampu mempertahankan posisi surplus ke negara-negara yang sudah dikuasai tersebut. Jatim tidak perlu khawatir, karena Jawa Timur adalah salah satu pusat industri nasional.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia.

Dalam menghadapi MEA 2016, peningkatan daya saing merupakan keniscayaan untuk dapat memenangkan pertarungan. Tanpa peningkatan daya saing produsen lokal, produk-produk lokal akan kalah bersaing. Alih-alih untuk meningkatkan dan mengembangkan produk untuk diekspor, bersaing dalam pasar lokal dan domestik pun bakal mengalami kesulitan. Sebab produk-produk negara pesaing yang berkualitas dan murah akan membanjiri pasar lokal dan domestik. Kita pun tidak lagi dapat memaksa masyarakat sebagai konsumen dengan romantisme seperti dalam iklan untuk memakai dan mencintai produk-produk lokal dan domestik, sebab masyarakat sudah semakin kritis dan memiliki preferensi.

Memasuki MEA memang diperlukan kesiapan yang lebih baik, guna mendapatkan keuntungan. Jika Jawa Timur mampu memanfaatkannya, perekonomian Jawa Timur khususnya akan mencapai kejayaan. Kejayaan dalam arti Jawa Timur sebagai bagian Indonesia yang berpengaruh dan dihormati dunia, khususnya ASEAN, karena mampu memanfaatkan semangat globalisasi. Semoga dalam menghadapi *Asean Community* ini, Jawa Timur khususnya bisa menata kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan tentu saja amanat reformasi tahun 1998.

Pilihan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota adalah segera menetapkan “strategi perang” dalam bentuk kebijakan-kebijakan terpadu guna menciptakan iklim usaha yang meningkatkan daya saing

produsen lokal untuk mau dan mampu bersaing, baik di pasar lokal dan domestik maupun pasar global. Kebijakan-kebijakan terpadu dimaksud, diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala yang disebutkan di atas. Selamat datang MEA, Jawa Timur siap menyambutmu....(*Penulis adalah Widyaiswara Muda Bandiklat Jatim, kandidat doktor PSDM Unair*)